

HILLARY CLINTON VS DONALD TRUMP: QUO VADIS INTERVENSI KEMANUSIAAN?

Verdinand Robertua

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Kristen Indonesia,
Verdinand.robertua@gmail.com

Abstract

This research discussed the comparison of Hillary Clinton Foreign Policy with Donald Trump Foreign Policy on the legitimacy of humanitarian intervention in the United States Foreign Policy. Each presidential candidate have their own foreign policy which contradicting each other. The research question in on how to understand the difference of each candidate foreign policy with English School Theory. This research used the concept of humanitarian intervention and foreign policy. This article has two findings. First, human rights issues in Clinton Foreign Policy can rise new rivalry interaction for United States. Second, China as the biggest economy in Asia should be ready to confront new economic and security threat posed by each presidential candidate.

Key words: Hillary Clinton, Donald Trump, Presidential election, foreign policy, humanitarian intervention

Abstrak

Penelitian ini membahas perbandingan kebijakan luar negeri Hillary Clinton dan Donald Trump terkait legitimasi intervensi kemanusiaan dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Kedua kandidat calon presiden memiliki kebijakan luar negeri yang berbeda dan berlawanan. Pertanyaan penelitian yang dibahas adalah bagaimana memahami perbedaan kebijakan luar negeri Clinton dan Trump mengenai intervensi kemanusiaan dengan menggunakan teori English School. Konsep yang digunakan penelitian ini adalah intervensi kemanusiaan dan kebijakan luar negeri. Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, masalah hak asasi manusia yang dibawa oleh Clinton di berbagai negara dapat menjadi rivalitas baru bagi AS. Kedua, Tiongkok sebagai negara ekonomi terbesar di Asia harus siap menghadapi ancaman ekonomi dan keamanan yang dibawa oleh Trump atau Clinton.

Kata kunci: Hillary Clinton, Donald Trump, pemilihan presiden, kebijakan luar negeri, intervensi kemanusiaan.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pada tanggal 8 November 2016, masyarakat Amerika Serikat (AS) menentukan pilihan siapa yang menjadi Presiden AS ke-45. Calon presiden dari Partai Demokrat Hillary Clinton dapat menjadi presiden perempuan pertama dalam sejarah politik AS dan Donald Trump calon presiden dari Partai Republik telah mengguncang dunia dengan pernyataan-pernyataannya yang kontroversial seperti larangan masuk bagi Muslim dan

pembangunan tembok di perbatasan Meksiko-AS.

Setiap negara memiliki kebijakan luar negeri dalam melakukan interaksi dengan negara lain. Untuk itu setiap negara perlu merumuskan sebuah kebijakan agar dapat hidup dengan negara lain dalam mencapai tujuan bersama. Pengambilan kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh faktor domestik dan faktor internasional. Pada pemerintahan George Bush, faktor internasional menempati posisi dominan sedangkan pada pemerintahan Obama faktor domestik lebih diutamakan dalam pengambilan kebijakan luar negeri.

Pada masa George W Bush kebijakan luar negeri Amerika Serikat cenderung mengutamakan kekuatan militer tanpa memperdulikan kecaman dari negara lain maupun dari PBB. Kecaman tersebut muncul ketika AS menyerang Afghanistan dan Irak. Pergantian kepemimpinan di AS kepada Barrack Obama pada tahun 2009 adalah sebuah fenomena karena untuk pertama kali seorang warga negara berkulit hitam mampu memenangkan pemilihan umum pada tahun 2009 dan menarik mundur pasukan AS dari Irak (Wiarda, 2011: 89).

Pemilihan presiden 2016 menghadirkan perdebatan ekstrim antara pluralis dan solidaris. English School, teori yang dikemukakan oleh Barry Buzan, Hedley Bull dan Martin Wight, memiliki dua pilar yaitu pluralis dan solidaris. Pluralis lebih menekankan kepada tatanan internasional, non-intervensi dan kedaulatan negara sedangkan solidaris menekankan kepada perjuangan dan transformasi sistem internasional ke arah pencapaian nilai-nilai ideal seperti keadilan dan hak asasi manusia. Pluralisme dalam kebijakan luar negeri AS berarti AS tidak aktif mencari musuh untuk dihancurkan. Kedaulatan dan non-intervensi menjadi kata kunci dalam pluralisme. Pluralis tidak menginginkan AS terlibat di dalam perjuangan nilai-nilai kemanusiaan seperti hak asasi manusia dan demokrasi. Solidarisme lebih tepat dijelaskan dengan pernyataan John F. Kennedy pada tahun 1961, "*We shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe to assure the survival and the success of liberty*" (Henriksen, 2012: 56)."

Kebijakan luar negeri AS bersifat dinamis dari kebijakan pluralisme yang dilaksanakan sebelum Perang Dunia I dan kebijakan solidarisme pada Perang Dingin. Berbagai institusi terbentuk pada Perang Dingin seperti International Monetary Fund dan World Bank. Tragedi tabrakan dua pesawat ke gedung World Trade Center memperluas intervensi

AS di dunia dengan slogan perang terhadap terorisme. Amerika Serikat bahkan menggulingkan Pemerintahan Saddam Husein di Irak atas ancaman terorisme.

Donald Trump berusaha menarik pendulum kebijakan luar negeri AS ke arah pluralisme dengan kebijakan anti-imigrasi, pembangunan tembok raksasa di perbatasan Meksiko-AS dan penarikan sumber daya AS dari NATO. Clinton berusaha mempertahankan peran AS dengan melanjutkan kebijakan luar negeri Obama seperti Pivot to Asia, Transpacific Partnership dan keterlibatan AS di East Asia Forum dan Strategic of Economic and Military.

Donald Trump lebih fokus kepada elaborasi pluralisme seperti oposisi terhadap kebijakan aliansi, oposisi terhadap intervensi kemanusiaan dan penguatan kerjasama dengan Rusia. Hillary Clinton lebih fokus kepada keterlibatan Amerika Serikat di berbagai kawasan dan kampanye nilai demokrasi dan hak asasi manusia serta intensifikasi perdagangan global melalui implementasi transparansi dan keadilan dalam sistem perdagangan global.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam artikel ini adalah bagaimana memahami perbedaan kebijakan luar negeri Clinton dan Trump mengenai intervensi kemanusiaan dengan menggunakan teori English School.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penelitian ini memiliki maksud dan tujuan memberikan analisis yang mendalam terkait kebijakan luar negeri Clinton dan Trump terkait intervensi kemanusiaan dengan menggunakan teori English School.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan praktis dan teoretis. Kegunaan praktis berkenaan dengan dampak kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Indonesia sedangkan kegunaan teoretis berkenaan dengan pengembangan pemikiran English School.

2. Kajian Pustaka

2.1 Intervensi Kemanusiaan (*Responsibility to protect*)

Konsep ini muncul dalam World Summit pada tahun 2005 dan disepakati sebagai konsep justifikasi intervensi Dewan Keamanan PBB di dalam merespons masalah keamanan di Darfur, Pantai Gading, Sudan Selatan, Syria dan Libya. *Responsibility to protect* (RtP) muncul dari kegelisahan terhadap krisis kemanusiaan di berbagai negara seperti genosida, konflik horizontal yang menewaskan banyak manusia dan bencana alam. Muncul berbagai bantuan internasional dalam bentuk bantuan finansial, pengerahan pasukan perdamaian, pembentukan area aman, atau zona dilarang terbang.

Sebelum kelahiran RtP, konsep kedaulatan negara sebagai tanggung jawab dikembangkan sebagai landasan moral bagi intervensi kemanusiaan oleh komunitas internasional. Sejumlah organisasi regional berinisiatif mengembangkan RtP. Uni Afrika (AU) mencapai kesepakatan untuk melakukan intervensi kemanusiaan di negara anggota apabila terjadi genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. AU juga mengembangkan pasukan perdamaian sendiri dan melaksanakan mandat RtP di Darfur pada tahun 2003. Uni Eropa juga memiliki pasukan perdamaian yang siap dikerahkan mengatasi krisis kemanusiaan. NATO juga memasukkan perlindungan warga sipil dalam manajemen krisis. RtP secara bulat didukung oleh KTT Dunia 2005, yang terbesar yang pernah

mengumpulkan dari Kepala Negara dan Pemerintahan.

PBB menetapkan strategi komprehensif untuk menerapkan RtP, mengadopsi pendekatan terbatas dan komprehensif. RtP bersifat terbatas karena fokus pada pencegahan empat kejahatan yaitu genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Rtp bersifat komprehensif karena menggunakan semua instrumen yang tersedia untuk mengimplementasikan RtP mulai dari instrumen yang dimiliki PBB, organisasi regional dan sub-regional, negara anggota, dan masyarakat sipil. Strategi ini diselenggarakan di sekitar gagasan bahwa RtoP bertumpu pada tiga pilar. Pilar ini adalah non-sekuensial yaitu pelaksanaan satu pilar tidak perlu menerapkan pilar kedua dan ketiga dan ketiga pilar sama pentingnya sehingga seluruh bangunan RtP akan runtuh jika tidak didukung oleh ketiga pilar (Bellamy, *Responsibility to Protect* 2009: 23).

Pilar pertama mengacu pada tanggung jawab utama negara untuk melindungi penduduknya dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sekretaris Jenderal menekankan pilar ini sebagai landasan dari RtP yang berasal dari tanggung jawab negara itu sendiri dan kewajiban hukum internasional yang menyatakan mereka sudah punya. Pilar kedua mengarah kepada tanggung jawab masyarakat internasional untuk membantu dan mendorong negara-negara untuk memenuhi tanggung jawab mereka untuk melindungi, terutama dengan membantu mereka untuk mengatasi penyebab genosida dan kekejaman kemanusiaan, membangun kapasitas untuk mencegah kejahatan-kejahatan ini, mencegah masalah kemanusiaan sebelum meningkat, dan mendorong mereka untuk memenuhi komitmen mereka. Pilar III mengacu tanggung jawab masyarakat internasional untuk mengambil tindakan yang tepat waktu dan tegas untuk melindungi penduduk dari empat

kejahatan melalui tindakan diplomatik, kemanusiaan dan cara non-kekerasan yang lain terutama sesuai dengan Bab VI dan VIII dari Piagam PBB dan, pada kasus-kasus dimana cara damai tidak memadai maka instrumen kekerasan dengan berpedoman Bab VII Piagam PBB.

Keunggulan konsep RtP adalah fokus kepada yang korban kekerasan sistematis yang membutuhkan pertolongan dari negara lain. Konsep intervensi kemanusiaan menimbulkan protes keras dari negara-negara berkembang karena mereka melihat intervensi sebagai ancaman keamanan. Kedua, RtP memprioritaskan negara pelaku menanggulangi masalah keamanan internal. Apabila gagal, komunitas internasional berhak melindungi korban kekerasan massal di negara tersebut. Ketiga, RtP memiliki konsep-konsep turunan seperti *responsibility to react*, *responsibility to prevent* dan *responsibility to rebuild*. Dalam *responsibility to react*, terdapat empat komponen yang harus diperhatikan yaitu *right authority*, *just cause*, *right intention*, dan *last resort*. Gabungan ketiga karakter ini menggambarkan RtP sebagai konsep komprehensif yang mendorong transformasi persepsi terhadap kedaulatan negara dari sebagai hak menjadi kewajiban. Kedaulatan negara tidak hanya diartikan sebagai kekuasaan dan kekuatan tetapi sebagai kontrol dan tanggung jawab (Evans and Sahnoun, 2002).

Fungsi konsep RtP adalah perwujudan komitmen pencegahan dan penghentian genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. RtP dapat digunakan sebagai peringatan serius bagi pemimpin negara untuk tidak menggunakan kekuatan militer untuk kejahatan terhadap kemanusiaan. RtP digunakan sebagai pemicu tindakan darurat penanggulangan krisis kemanusiaan di sebuah negara. PBB menjadikan RtP sebagai agenda kebijakan PBB yang diterjemahkan dalam bentuk laporan dan kajian. Ban Ki-Moon mengatakan bahwa masih banyak yang harus

dilakukan untuk mengimplementasikan RtP seperti pasukan perdamaian PBB dan pendanaan yang memadai.

Bellamy (2011: 56) mengajukan proposisi RtP sebagai norma karena terdapat persepsi bersama di antara pemimpin negara bahwa RtP adalah sebuah tanggung jawab negara yang harus dilaksanakan. Implikasi RtP sebagai norma adalah kritik dari masyarakat internasional kepada pemimpin negara apabila negara tidak melakukan RtP dalam krisis kemanusiaan. Mahkamah Internasional (ICJ) mengkonfirmasi perspektif ini dengan memutuskan bahwa negara memiliki kewajiban hukum untuk mengambil langkah darurat untuk mencegah genosida. Keputusan ICJ ini dihasilkan dalam kasus Bosnia melawan Serbia.

RtP menekankan kepada *responsibility to prevent* dan menghasilkan konsep diplomasi preventif. Kofi Annan mendefinisikan diplomasi preventif: "*action to prevent disputes from arising between parties, to prevent existing disputes from escalating into conflicts and to limit the spread of the latter when they occur.*" (Jenča, 2013: 184). Terdapat dua macam diplomasi preventif yaitu structural dan langsung. Diplomasi preventif structural menyelesaikan akar masalah konflik dalam jangka panjang dan multi-dimensional. Akar masalah dapat muncul dari masalah kemiskinan, tata kelola pemerintahan yang buruk dan diskriminasi etnik. Diplomasi ini juga melibatkan aktor yang beragam seperti Bank Dunia, International Monetary Fund, United Nations Development Programme atau non-governmental organizations. Diplomasi preventif dalam dilakukan dengan kebijakan ekonomi, budaya dan politik. Keterkaitan antara masalah ekonomi dengan diplomasi preventif dibahas secara detail oleh Michael Brown dengan mengatakan:

"Particular attention should be paid to political and economic development in troubled and potentially troubled parts of the world. In more concrete terms, this means working more aggressively to

ensure that individuals and groups need not fear for their survival or security; overturn patterns of political, economic, and cultural discrimination; promote proportional representation in political and governmental affairs; establish and implement human rights safeguards; dampen the development of exclusionary national ideologies, whether they are based on ethnic or religious identifications; extend the benefits of economic prosperity and educational opportunities more equitably across societies; and work to develop civil societies by addressing the pernicious effects of distorted group histories and by promoting the values of compromise, conciliation, consensus, and tolerance” (Brown, 1996: 625).

Brown menekankan RtP tidak hanya sebatas masalah genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap etnis dan kemanusiaan tetapi juga masalah kesenjangan ekonomi dan diskriminasi hak kelompok-kelompok tertentu berdasarkan agama dan ras. Pemikiran solidarisme yang merupakan pilar English School menginspirasi bantuan sebuah negara terhadap negara lain dengan argumentasi nilai-nilai solidaritas kemanusiaan. Hillary Clinton menggunakan konsep ini sebagai justifikasi intervensi kemanusiaan di Libya, Syria dan Afghanistan. Terlihat disini bagaimana Hillary Clinton mewakili kelompok solidaris yang menekankan konsep RtP.

2.2 Kebijakan Luar Negeri

Secara umum, kebijakan luar negeri (*foreign policy*) merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional. Suatu komitmen yang pada dasarnya merupakan strategi dasar untuk mencapai suatu tujuan baik dalam konteks dalam negeri dan luar negeri, serta sekaligus menentukan keterlibatan suatu negara di dalam isu-isu internasional atau lingkungan di sekitarnya.

Salah satu cara untuk memahami konsep politik luar negeri adalah dengan jalan memisahkannya ke dalam dua komponen:

kebijakan dan luar negeri. Kebijakan (*policy*) adalah seperangkat keputusan yang menjadi pedoman untuk bertindak, atau seperangkat aksi yang bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. *Policy* itu sendiri berakar pada konsep "pilihan (*choices*)" memilih tindakan atau membuat keputusan-keputusan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan gagasan mengenai kedaulatan dan konsep "wilayah" membantu upaya memahami konsep luar negeri (*foreign*). Kedaulatan berarti kontrol atas wilayah (dalam) yang dimiliki oleh suatu Negara. Jadi, kebijakan luar negeri (*foreign policy*) berarti seperangkat pedoman untuk memilih tindakan yang ditujukan ke luar wilayah suatu Negara.

Kebijakan Luar Negeri mengacu kepada kebijakan yang diterapkan suatu negara terhadap dunia luar batas teritorial negara tersebut. Kebijakan Luar negeri menurut Holsti (1992, 16) ialah, strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik Internasional lainnya dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. Senada dengan K.J Holsti, Mark R. Amstutz (2013: 18), mendefinisikan politik luar negeri sebagai: *the explicit and implicit actions of governmental officials designed to promote national interests beyond a country's territorial boundaries*. Pada defenisi ini, terdapat tiga tekanan utama yaitu tindakan atau kebijakan pemerintah, pencapaian kepentingan nasional dan jangkauan kebijakan luar negeri yang melawati batas kewilayahan negara.

Terdapat lima landasan pembuatan sumber kebijakan luar negeri yaitu sumber eksternal, sumber masyarakat, sumber pemerintah, sumber peran dan sumber individu. Sumber eksternal meliputi atribut-atribut yang ada di dalam sistem internasional dan sikap suatu negara di dalam menjalankannya. Sumber eksternal mencakup perubahan yang terjadi di lingkungan

eksternal, kebijakan dan tindakan dari negara lain baik itu berupa konflik, kerjasama, ancaman, dukungan baik langsung atau tidak langsung. Sumber masyarakat yaitu seluruh karakteristik sosial domestik dan sistem politik yang membentuk Orientasi masyarakat terhadap dunia. Intinya adalah seluruh aspek non-pemerintah dari sistem politik yang mempengaruhi kebijakan luar negeri. Hal ini meliputi keadaan geografis, etnis, nilai atau norma yang berkembang di masyarakat, populasi, atau opini publik. Sumber pemerintah meliputi seluruh elemen dari struktur pemerintahan yang memberikan pertimbangan kebijakan luar negeri yang sifatnya memperluas atau membatasi pilihan yang diambil dan terakhir adalah sumber peran individu yang meliputi nilai-nilai dari seseorang pemimpin atau pengambil keputusan sebagai ideologinya, pengalaman hidupnya, masa kecilnya, latar belakang pendidikannya, dan segala sesuai yang mempengaruhi persepsi karakter.

Rosenau (1995: 32) mengatakan bahwa kebijakan luar negeri memiliki tiga konsep yaitu kebijakan luar negeri sebagai sekumpulan orientasi, seperangkat komitmen untuk bertindak, dan sebagai bentuk perilaku. Sebagai sebuah orientasi, kebijakan luar negeri menjadi sebuah pedoman bagi para pembuat keputusan untuk menghadapi situasi eksternal. Sebagai sebuah seperangkat komitmen untuk bertindak, kebijakan luar negeri bertransformasi menjadi komitmen dan rencana konkret yang dikembangkan pembuat keputusan dan sesuai dengan Orientasi kebijakan luar negeri. Sebagai sebuah bentuk perilaku, kebijakan luar negeri adalah langkah-langkah nyata yang diambil oleh pembuat kebijakan yang berhubungan dengan kejadian serta situasi di lingkungan eksternalnya.

Viotti dan Kauppi (1997: 89) menjelaskan bahwa tujuan kebijakan luar negeri diperoleh berdasarkan empat konsep yaitu peluang, ancaman, kepentingan dan kapabilitas nasional. Keempat konsep ini menentukan

apakah sebuah kebijakan luar negeri berhasil atau tidak. Dalam masalah konflik perebutan Laut Tiongkok Selatan, misalnya, AS harus memperhatikan peluang dan ancaman yang diperoleh dari kebijakan intervensi AS di dalam isu tersebut seraya merealisasikan kepentingan dan pemberdayaan kapabilitas nasional.

Berbeda dengan RtP, kebijakan luar negeri lebih banyak diwarnai oleh pemikir pluralis seperti Chris Brown. Brown menekankan bahwa tindakan intervensi kemanusiaan seperti yang diadvokasikan oleh solidaritas sulit terealisasi karena resistensi dari elit politik nasional yang menginginkan fokus sumber daya negara ke dalam negeri. Brown menekankan bahwa proses kebijakan luar negeri melalui serangkaian tahapan yang berbeda dengan pengambilan kebijakan dalam negeri. Chris Brown menyatakan:

“Pluralist theory, as distinct from solidarism, assumes that these two forms of policy are different; in the case of domestic policy, the state is, in principle, capable of getting its way having decided, on a course of action, that is to say it possesses both the authority to act, and the means to do so. In foreign policy this is not so; outcomes are the product of interdependent decision-making. The state cannot expect that other states will respect its authority, because in an anarchical system no state possesses authority, and whether or not the states has the means to get its way is a contingent matter – whereas domestically the state, in principle, possesses a monopoly of the means of coercion, internationally no state is in this position. What this means is that we can distinguish two aspects of the study of foreign policy; the way in which foreign policy is formulated – which might be rather similar to the way in which domestic policy is formulated – which is likely to be very different.” (C. Brown, 2001: 75)

Oleh sebab itu, kebijakan luar negeri tidak dapat mengasumsikan bahwa negara lain setuju terhadap intervensi kemanusiaan melainkan perlu ditinjau terlebih dahulu apakah intervensi kemanusiaan mendapatkan dukungan dari negara yang diintervensi dan mitra kerjasama. Donald Trump mewakili

kelompok ini dan tidak setuju terhadap penggunaan kekuatan AS untuk intervensi kemanusiaan. Kebijakan luar negeri harus memperhatikan kapabilitas dan peluang ekonomi AS dan kebijakan luar negeri harus dievaluasi berdasarkan keuntungan ekonomi yang diperoleh AS.

3. Objek dan Metode Penelitian

Metodologi penelitian ini adalah metodologi interpretasi dan kualitatif. Penelitian ini hendak mencari makna dan proses serta konteks dari studi kasus yang diangkat. Menurut Denzin dan Lincoln (2011: 12), penelitian kualitatif menggunakan lebih dari satu metode dan menekankan kemampuan interpretasi penulis. Creswell (2003: 23-25) menegaskan bahwa penelitian kualitatif adalah metode mencari jawaban dari pertanyaan penelitian yang kompleks dan membutuhkan gambaran yang menyeluruh. Masalah yang kompleks mengacu kepada masalah yang bersifat multi-dimensional, paradoks, dan dilematis. Tujuan yang dicapai dari sebuah penelitian kualitatif adalah memahami makna, proses, latar belakang dan mencari kausalitas dan pola.

Hal ini sesuai dengan fungsi teori dalam penelitian kualitatif sebagai instrumen untuk memahami masalah. Terdapat dua tujuan teori yaitu penjelasan (*explaining*) dan pemahaman (*understanding*) dalam penelitian (Kurki and Wight, 2010: 20). Pemikir neo-realis dan neo-liberalis mengedepankan simplikasi fenomena hubungan internasional ke dalam berbagai formula dan rumus yang dapat diaplikasi ke dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Tujuan teori bagi pemikir neo-realis dan neo-liberalis adalah untuk menjelaskan (*explaining*). Teori adalah alat untuk melakukan simplifikasi tersebut sehingga dibutuhkan pengetahuan mengenai rumus-rumus matematis yang sering digunakan ilmuwan fisika dan kimia. Pemikir ES memprioritaskan pemahaman peneliti mengenai signifikansi makna (*meaning*),

simbol dan nilai yang digunakan negara. Teori adalah alat untuk memahami kompleksitas dan kerumitan kenyataan. Tujuan teori bagi pemikir ES adalah untuk memahami (*understanding*).

Penggunaan metode kualitatif terkait erat dengan teori English School yang digunakan penelitian ini. Seperti yang diuraikan dalam sub-bab tinjauan pustaka, English School adalah teori yang menjelaskan bukan hanya kompetisi mengejar kekuatan dan kekuasaan tetapi juga perdebatan mengenai legitimasi, keanggotaan, pengakuan, kesetaraan, peran, resiprokalitas, perjanjian, kebiasaan, atau kerugian. Untuk menjelaskan kompetisi mengejar kekuatan dan perdebatan nilai, English School memiliki kerangka pemikiran pluralisme dan solidarisme. Definisi kedua pilar ini sudah dijelaskan dalam kerangka pustaka. Metode penelitian kualitatif menjadi fondasi bagi perdebatan ini. Reus Smith menekankan perdebatan ini dengan mengatakan “*This distinction has since provided the basic framework for debate within the English School about the scope for, and desirability of, moral action in international relations, a debate which itself marks the School off from parallel trends in American thinking*” (Reus-Smith. 2009: 64-65).

Nicholas Wheeler dan Robert Jackson adalah peneliti English School yang menggunakan dikotomi pluralisme dan solidarisme dalam penelitiannya. Wheeler menulis buku *Saving Stranger* diawali dengan perdebatan antara pluralisme dan solidarisme dan menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan yang besar masyarakat internasional menuju skenario solidarisme. Robert Jackson juga menggunakan dikotomi solidarisme dan pluralisme dan menemukan pola-pola pluralisme yang terjadi terus-menerus dalam masyarakat internasional.

Metodologi interpretasi yang digunakan English School merupakan respons terhadap neo-realisme dan neo-liberalisme yang menggunakan metodologi positivisme. Metodologi positivisme berangkat dari kekusaran pemikir hubungan internasional terhadap ilmu hubungan internasional yang tidak memiliki model matematis yang digunakan ilmu eksakta. Positivis juga menekankan data penelitian dapat diukur secara tepat dan rinci agar data tersebut dapat diolah

menjadi sebuah kalkulasi statistik yang dapat ditetapkan sebagai sebuah kaidah. Bahkan Morton Kaplan (1968: 35) mengatakan, “*If you cannot measure it, your knowledge is meagre and unsatisfactory*”. Positivis seperti Kaplan dan Martin Singer mengkritik pemikir realis klasik mengenai konsep *power* dan kepentingan nasional yang tidak memiliki penjelasan matematis dan model yang dapat direplikasi dalam penelitian hubungan internasional.

Pemikir English School menolak metodologi positivisme karena metodologi positivisme gagal melihat nilai dan norma yang memotivasi negara mempengaruhi negara lain. Nilai, norma dan keyakinan merupakan komponen penting hubungan internasional yang sifatnya tidak terlihat. Butterfield dan Wight menekankan hal ini dengan mengatakan:

“by contrast with those studies of state-systems which view them as determined purely by mechanical factors such as the number of states in the system, their relative size, the political configuration in which they stand, we placed emphasis on the norms and values that animate the system, and the institutions in which they are expressed” (Butterfield and Wight, 1966: 17).

Penelitian ini terinspirasi dari perdebatan utama hubungan internasional. Metodologi penelitian ini disesuaikan dengan pertanyaan penelitian yang terkait perdebatan utama hubungan internasional. Perdebatan norma yang terjadi membutuhkan metodologi interpretasi. Terjadi dialog konstan terkait masalah lingkungan hidup antara pemikir HI. Peneliti memotret perdebatan ini melalui kajian literatur. Melalui berbagai artikel jurnal dan buku yang ditulis pemikir HI, peneliti dapat mencari butir-butir pemikiran dan dikategorisasikan dalam pluralisme dan solidarisme yang telah dikembangkan pemikir English School. Dialog antara pemikir HI menjadi data penelitian dan diolah menggunakan teori English School. Proses penelitian ini adalah mencari data, mengkategorisasikan data, mencari titik koeksistensi, formulasi konsep berdasarkan titik koeksistensi tersebut. Peneliti menginterpretasikan studi kasus menjadi makna yang memotivasi kebijakan dan tindakan negara.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus tunggal dan *process tracing*. Dalam riset dengan menggunakan sebuah studi kasus, peneliti akan melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya (Creswell, 2003: 133). Sebagai hasilnya, diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan konsekuensi ilmiah dan akademis dari fenomena tersebut.

Porta dan Keating (2008: 148) memberikan beberapa alasan mengapa penelitian dengan metode studi kasus tunggal dapat menjadi metode efektif dalam membangun teori. Dialog intensif antara cara berpikir peneliti dengan data menjadi kelebihan dari metode ini. Penggunaan sebuah studi kasus dapat membuka keragaman dari sebuah kasus dengan melihat sejarah kasus tersebut. Kompleksitas hubungan antar variabel dapat dijelaskan secara rinci. Penjelasan sebuah studi kasus tidak dimaksudkan untuk generalisasi ke dalam kasus lain. Teori tidak mendefinisikan perilaku namun perilaku negara yang membangun sebuah teori. Sudut pandang yang dipakai adalah dialog dua arah dan terus-menerus antara pendekatan empiris dan teoretik.

Penelitian ini mengaplikasikan ES ke dalam studi kasus perbandingan kebijakan luar negeri Clinton dan Trump terkait intervensi kemanusiaan. Penelitian ini menggunakan metode *process-tracing*. Metode ini berusaha mengidentifikasi proses sebab-akibat dengan variabel independen dan variabel dependen. Metode ini dielaborasi secara intensif oleh Alexander George and Andrew Bennett dalam buku *Case Studies and Theory Development in Social Sciences*. Metode *process-tracing* mempelajari urutan peristiwa dengan tujuan menguji hipotesis tertentu apakah konsisten dalam urutan peristiwa yang dipilih peneliti. Penelitian ini menguji hipotesa apakah

kepentingan negara yang tertuang dalam kebijakan luar negeri selalu bertolak belakang dengan intervensi kemanusiaan?

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hillary Clinton

Kebijakan luar negeri Clinton terlihat dalam tulisannya yang berjudul “America’s Pacific Century” di majalah Foreign Policy. Dalam artikel tersebut, Clinton menjabarkan kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Asia “Pivot to Asia”. Clinton juga mempertegas posisi Amerika Serikat di dalam perdebatan mengenai kebijakan pluralisme dan solidarisme Amerika Serikat dengan mengatakan bahwa Amerika Serikat memprioritaskan kerjasama internasional baik bilateral maupun multilateral dengan prinsip *win-win solution*. Clinton mengatakan:

For more than six decades, the United States has resisted the gravitational pull of these “come home” debates and the implicit zero-sum logic of these arguments. We must do so again. Beyond our borders, people are also wondering about America’s intentions — our willingness to remain engaged and to lead. In Asia, they ask whether we are really there to stay, whether we are likely to be distracted again by events elsewhere, whether we can make — and keep — credible economic and strategic commitments, and whether we can back those commitments with action. The answer is: We can, and we will (Clinton, 2011).

Dari kutipan Clinton ini terlihat perdebatan yang menginginkan AS fokus ke politik dan ekonomi domestik dan pihak lain yang menginginkan AS yang aktif di dalam forum internasional. Negara-negara Asia menyoroti peran AS yang bertransformasi dalam era Obama dengan fokus pendekatan multilateralisme dan hukum internasional. Tidak ada terobosan dalam kebijakan luar negeri AS di Asia.

Clinton mengakui bahwa kebijakan luar negeri AS di Asia menemui banyak resistensi. Kebijakan intervensi AS di Myanmar,

misalnya, diprotes oleh Pemerintah Myanmar dengan argumentasi kedaulatan negara. Kebijakan intervensi AS di konflik Laut Tiongkok Selatan mengundang protes dan kemarahan dari Tiongkok. Kedua kasus ini menjadi indikator tujuan prioritas keterlibatan AS di Asia. Clinton menegaskan bahwa Tiongkok harus patuh pada prinsip transparansi dan keadilan. Clinton meminta Tiongkok melaksanakan kebijakan-kebijakan baru seperti pelonggaran nilai Yuan, penghapusan diskriminasi terhadap produk-produk impor.

Pertentangan antara kebijakan luar negeri dengan nasionalisme ekonomi. Amerika Serikat belum menyelesaikan dilema antara kepentingan ekonomi dengan perjuangan hukum internasional, demokrasi dan hak asasi manusia. *Pivot to Asia* tidak menjadi solusi harmonisasi ketiga hal tersebut dan justru menekankan kepada kerjasama diplomatik, ekonomi dan keamanan dan membiarkan konflik ketiga konsep tidak terselesaikan. Terjadi inkonsistensi ketika Clinton memperjuangkan hak asasi manusia dan demokrasi di Myanmar tetapi membuka definisi demokrasi dan HAM seluas-luasnya. Kontradiksi ini terlihat dalam kutipan berikut ini:

But even more than our military might or the size of our economy, our most potent asset as a nation is the power of our values — in particular, our steadfast support for democracy and human rights. As we deepen our engagement with partners with whom we disagree on these issues, we will continue to urge them to embrace reforms that would improve governance, protect human rights, and advance political freedoms. We cannot and do not aspire to impose our system on other countries, but we do believe that certain values are universal — that people in every nation in the world, including in Asia, cherish them — and that they are intrinsic to stable, peaceful, and prosperous countries. Ultimately, it is up to the people of Asia to pursue their own rights and aspirations, just as we have seen people do all over the world (Clinton, 2011).

Kebijakan luar negeri Clinton fokus kepada kerjasama dengan negara-negara Asia dengan pedoman demokrasi dan hak asasi manusia. RtP diarahkan kepada diplomasi dan organisasi internasional dengan penguatan institusionalisasi yang lebih dalam. Obama sudah memulai institusionalisasi ini dengan kehadirannya di East Asia Forum dan ASEAN+3. Kemenangan Hillary Clinton dapat menterjemahkan kebijakan luar negeri Obama dengan bantuan ekonomi yang lebih besar bagi negara-negara Asia tetapi dapat juga preferensi status quo dengan pernyataan-pernyataan dukungan dari Clinton terhadap kemajuan perlindungan HAM dan demokrasi. Clinton meneruskan sejarah “American Exceptionalism” yang mengandung unsur promosi nilai-nilai Barat seperti HAM dan demokrasi (McCrisken, 2003: 77).

Secara khusus, Clinton juga memperjuangkan hak-hak masyarakat lesbian, gay, bisexual, transsexual (LGBT) di berbagai negara termasuk Indonesia. Ketika menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hilary Clinton pada tahun 2011 mendatangi Indonesia untuk mengkampanyekan HAM bagi kaum LGBT, dan hal-hal seperti ini juga dilakukan secara rutin melalui diskusi tentang isu-isu LGBT dengan para masyarakat madani di Indonesia oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia (Laville, 2011: 56). Dan Wakil Duta Besar Amerika Serikat mengadakan jamuan makan siang bagi para aktivis hak-hak LGBT dan hak-hak asasi manusia lainnya pada tanggal 14 Mei untuk memperingati Hari Anti Homophobia Sedunia.

Clinton menentang usaha-usaha untuk mendiskriminasi, mengkriminalisasi dan menghukum anggota-anggota komunitas LGBT. Clinton mengakui usaha-usaha dan keberanian para aktivis dan organisasi yang berjuang untuk menjunjung kesamarataan dan keadilan di seluruh dunia, terutama di negara-negara dimana hal ini dapat mengancam jiwa mereka dan keluarga mereka. Pada saat yang sama, kebijakan-kebijakan kepegawaian AS

diharuskan juga untuk melindungi hak kaum LGBT, dan fasilitas-fasilitas konsuler maupun perangkat lainnya harus digunakan untuk memberikan akses dan hak-hak yang sama bagi kaum LGBT. Kepemimpinan AS dalam memajukan hak asasi manusia bagi kaum LGBT konsisten dengan kebijakan Pemerintah Obama untuk membuka hubungan-hubungan mendasar dengan seluruh dunia serta komitmen kami untuk menjunjung standar-standar universal yang dimiliki oleh semua orang. Mengangkat isu HAM dan demokrasi berpotensi membuka rivalitas dengan berbagai negara termasuk Indonesia. Negara-negara yang tidak setuju dengan legalisasi LGBT seperti Indonesia mengancam boikot terhadap kerjasama AS karena resistensi dari masyarakat nasional terhadap LGBT. Hal inilah yang mendorong Resnick (2016: 67) mengemukakan paradoks kebijakan luar negeri Clinton dimana kerjasama ekonomi AS dengan negara-negara Asia tidak ingin dipertaruhkan oleh Clinton karena topik LGBT ini. Clinton harus menghadapi dilema antara RtP dan kebijakan luar negeri negara-negara mitra AS karena RtP yang diprioritaskan oleh AS. Apabila berhasil menghadapi dilema ini dan mempermudah pelaksanaan RtP melalui organisasi internasional dan diplomasi, Clinton masuk ke dalam dinamika konvergensi dimana negara-negara mitra AS sudah sepakat menyelesaikan isu-isu yang sensitif seperti pelanggaran HAM dan melakukan institusionalisasi nilai-nilai baru tersebut.

Resiko yang harus dihadapi Clinton adalah anggaran diplomasi yang semakin membesar akibat bantuan-bantuan yang harus diberikan oleh Clinton bagi negara-negara berkembang yang memiliki sistem politik yang berseberangan dengan AS (Overhaus dan Brozus, 2016: 6). Obama menghadapi perlawanan dari Partai Republik di Kongres AS karena borosnya anggaran belanja Obama seperti alokasi untuk asuransi kesehatan murah Obamacare dan operasi keamanan di Eropa yang dipertahankan oleh Obama. Clinton juga harus menghadapi resistensi yang serupa dari

Partai Republik di Kongres AS karena memiliki pemikiran Donald Trump yang ingin memotong signifikan anggaran diplomasi dan keamanan AS.

Menggunakan kerangka kebijakan luar negeri Breuning (2007: 67), Clinton memiliki dua prioritas yaitu keamanan dan hak asasi manusia. Dalam bidang keamanan, Clinton lebih aktif di dalam mengkampanyekan manajemen konflik dan mencegah eskalasi kekerasan. Dalam bidang hak asasi manusia, Clinton berusaha mewujudkan legitimasi HAM di banyak negara.

3.2 Donald Trump

Kebijakan luar negeri Trump lebih fokus kepada penguatan kemampuan daya beli masyarakat AS. Trump menginginkan anggaran keamanan AS dikurangi signifikan dengan resiko mengurangi operasi keamanan AS di luar negeri. RtP yang dilaksanakan AS berkaitan dengan masalah keamanan diminimalkan dengan mengundang negara-negara yang memiliki komitmen yang kuat untuk menggantikan peran AS seperti Rusia. Trump beberapa kali menginginkan kerjasama dengan Rusia diperkuat untuk mengatasi berbagai masalah keamanan dunia termasuk masalah terorisme di Syria. Trump menginginkan negara-negara sekutu yang menikmati perlindungan dari AS seperti Korea Selatan dan Jepang harus membayar uang pengganti kepada AS untuk membiayai operasi keamanan tersebut. NATO organisasi yang menaungi aliansi AS dengan negara-negara Eropa Barat pun menjadi korban pemotongan anggaran Donald Trump.

Kebijakan luar negeri harus lebih fokus kepada isu-isu domestik sehingga masyarakat dapat menikmati lebih banyak hasil dari aktivitas diplomasi dan kerjasama internasional. RtP menjadi musuh bagi Trump karena menghabiskan anggaran yang begitu besar tanpa kontribusi yang seimbang bagi perekonomian AS. Nilai-nilai ideal seperti

demokrasi dan hak asasi manusia tidak menjadi prioritas bagi Trump terbukti dengan pernyataan-pernyataan Donald Trump yang menyanjung kepemimpinan diktator Putin dan Kim Jong Un.

Dalam pemerintahan Trump, dinamika interaksi yang terjadi adalah kerjasama. Logika sederhana yang dimiliki Trump adalah kerjasama memiliki konsekuensi anggaran yang lebih rendah karena meminta anggaran dari negara lain. Negara-negara mitra AS harus siap memperbesar anggaran keamanan untuk bekerjasama dengan AS. Trump sebenarnya tidak menginginkan rivalitas AS dengan negara-negara lain karena menurunkan fokus AS ke masalah-masalah keamanan dan hubungan internasional yang tidak menjadi isu favorit Trump. Dominasi AS di perekonomian dunia dan akses-akses eksklusif AS di berbagai organisasi ekonomi internasional menjadi prioritas Trump untuk dieksploitasi. Pemikiran pluralisme Trump berarti AS tidak aktif mencari musuh untuk dihancurkan. Kedaulatan dan non-intervensi menjadi kata kunci dalam pluralisme. AS tidak mau terlibat di dalam perjuangan nilai-nilai kemanusiaan seperti hak asasi manusia dan demokrasi.

Bagi negara-negara berkembang yang seperti Indonesia, kepemimpinan Trump justru menguntungkan karena lebih besar fokus kebijakan luar negeri AS di dalam bidang ekonomi yang selaras dengan kepemimpinan negara-negara berkembang seperti Indonesia dan Filipina yang juga memfokuskan diri dalam penguatan ekonomi. Menjadi masalah adalah Tiongkok harus menghadapi Trump yang menginginkan keuntungan yang lebih besar dari kerjasama ekonomi AS dan Tiongkok. Rivalitas dapat terjadi dan bahkan menuju perang apabila Tiongkok dan AS tidak menemui kesepakatan. Sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia baru, Tiongkok dianggap spesial oleh Trump karena berpotensi memajukan ekonomi AS dengan klausul perdagangan yang lebih memihak kepada AS.

Argumentasi yang diajukan oleh Trump terhadap Tiongkok adalah kesetaraan, transparansi dan keadilan. Trump menginginkan Tiongkok menghapuskan segala kebijakan diskriminasi produk-produk impor yang melemahkan daya saing produk-produk AS. Apabila tidak dilakukan, AS bersiap menghadapi perang tarif di dalam mengurangi impor barang dan jasa dari Tiongkok. Masalah yang harus dihadapi Tiongkok di dalam pemerintahan Trump adalah perebutan kepemilikan Laut Tiongkok Selatan antara Tiongkok dengan Malaysia, Vietnam, Filipina, Taiwan dan Thailand. Trump mengatakan bahwa Laut Tiongkok Selatan (LTS) tidak sepenuhnya dimiliki oleh Tiongkok. Sikap ini jelas berseberangan dengan kebijakan luar negeri Tiongkok yang berusaha mempertahankan kepemilikan seluruh area LTS. Tiongkok tidak menginginkan intervensi yang lebih dalam dari AS terkait LTS setelah kekalahan Tiongkok dalam Permanent Court of Tribunal yang tidak memberikan legitimasi hukum terhadap Tiongkok terhadap klaim nine-dash line.

Berbeda dengan Clinton, kebijakan luar negeri Donald Trump didominasi kepentingan ekonomi dengan berusaha memperbesar pasar bagi produk-produk dan investor AS. Dalam bidang keamanan, Trump berusaha menggunakan sumber daya negara mitra AS untuk menyelesaikan masalah-masalah keamanan global. Kebijakan luar negeri Trump terangkum dalam tabel 2.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Responsibility to protect dan kebijakan luar negeri merupakan dua pilihan yang dilematis. Hillary Clinton, calon presiden dari Partai Demokrat memilih untuk mengembangkan RtP sedangkan Donald Trump memilih memperkuat daya beli masyarakat AS sebagai salah satu tujuan utama kebijakan luar negeri AS. Kedua pilihan tersebut menemui resistensi dan potensi masalahnya masing-masing. Kampanye

Clinton terhadap hak asasi manusia termasuk kesetaraan hak LGBT dapat menimbulkan perdebatan sengit di negara-negara berkembang di Asia. Donald Trump yang menginginkan kebijakan luar negeri AS lebih keras terhadap pencapaian surplus ekonomi dengan negara-negara ekonomi besar seperti Tiongkok dapat memicu kekacauan ekonomi global. Kedua calon presiden ini membawa berbagai kebijakan yang berbeda dan saling berlawanan. Masyarakat AS yang menentukan kebijakan siapa yang menjadi kebijakan luar negeri AS dan negara-negara lain harus siap mengantisipasi kebijakan luar negeri AS di bawah presiden AS yang ke-46.

Daftar Pustaka

- Amstutz, Mark. 2013. *International Ethics: Concepts, Theories, and Cases in Global Politics*. Boulder: Rowman & Littlefield.
- Bellamy, Alex. 2011. *Global Politics and the Responsibility to Protect: from Words to Deeds*. Oxon: Routledge.
- . 2009. *Responsibility to Protect*. Cambridge: Polity Press.
- Breuning, Maurijke. 2007. *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction*. Basingstoke: Palgrave MacMillan.
- Brown, Chris. 2001. *Understanding International Relations*. New York: Palgrave.
- Brown, Michael Edward. 1996. *International Dimension of Internal Conflict*. Cambridge: MIT Press.
- Butterfield, Herbert, and Martin Wight. 1966. *Diplomatic Investigation*. Cambridge: Harvard University Press.
- Clinton, Hillary. 2011. *America's Pacific Century*. October 11. Accessed November 11, 2017. <http://foreignpolicy.com/2011/10/11/americas-pacific-century/>.

- Creswell, John W. 2003. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approach*. California: Sage Publications.
- Denzin, Norman K., and Yvonna S. Lincoln. 2011. *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. Thousands Oaks: Sage.
- Evans, Gareth, and Mohamed Sahnoun. 2002. "The Responsibility to Protect." *Foreign Affairs* 99-110.
- Henriksen, Thomas H. 2012. *America and the Rogue States*. Basingstoke: Palgrave MacMillan.
- Holsti, K.J. 1992. *International Politics: a Framework for Analysis*. New Jersey: Simon & Schuster.
- Jenča, Miroslav. 2013. "The Concept of Preventive Diplomacy." *Security and Human Rights* 183-194.
- Kaplan, Morton. 1968. "Systems Theory and Political Science." *Social Research* 30-47.
- Kurki, Milja, and Colin Wight. 2010. "International Relations and Social Science." In *International Relations Theories: Disciplines and Diversity*, by Tim Dunne, Milja Kurki and Steve Smith, 14-36. Oxford: Oxford University Press.
- Laville, Helen. 2011. "American Foreign Policy and Women's Right." In *Challenging US Foreign Policy*, by Bevan Sewell and Scott Lucas, 260-281. Basingstoke: Palgrave MacMillan.
- McCracken, Trevor. 2003. *American Exceptionalism and the Legacy of Vietnam*. Basingstoke: Palgrave MacMillan.
- Overhaus, Marco, and Lars Brozus. 2016. *US Foreign Policy after the 2016 Elections*. Berlin: German Institute for International and Security Affairs.
- Resnick, Evan N. 2016. *Hillary Clinton's Foreign Policy Paradox*. Singapore: RSIS.
- Reus-Smith, Christian. 2009. "Constructivism and the English School." In *Theorising International Society: English School Method*, by Cornelia Navari, 58-78. New York: Palgrave MacMillan.
- Rosenau, James. 1995. "Governance in the Twenty-First Century." *Global Governance* 13-43.
- Viotti, Paul R. , and Mark V. Kauppi. 1997. *International Relations and World Politics: Security Economy & Identity*. Upper Saddle River: Prentice River.
- Wiarda, Howard. 2011. *American Foreign Policy in a Region of Conflict: A Global Perspective*. Basingstoke: Palgrave MacMillan.

